



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.667779/2021**



DS:4574-1918-2898-8859

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
- Sebesar : Rp. 808.371.000 (DELAPAN RATUS DELAPAN JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	808.371.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 808.371.000

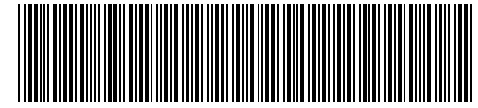
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2021



DS:4574-1918-2898-8859

Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	89.529.000
BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	89.529.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	718.842.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	718.842.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4574-1918-2898-8859

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			89.529.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			89.529.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	89.529.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	89.529.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			718.842.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			718.842.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4,00	Lembaga	89.529.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi JDIHN	4,00	Lembaga	89.529.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12,00	Kelompok Masyarakat	99.090.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	10,00	Kelompok Masyarakat	80.750.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	18.340.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4574-1918-2898-8859

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		5,00	Lembaga	54.276.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	5,00	Lembaga	54.276.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		5,00	Lembaga	62.597.000
Rincian Output		:	01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	5,00	Lembaga	62.597.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		45,00	Orang	360.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	45,00	Orang	360.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		5,00	Kelompok Masyarakat	53.350.000
Rincian Output		:	01	QBC.001	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	5,00	Kelompok Masyarakat	53.350.000

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4574-1918-2898-8859

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667779	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	-	798.371	10.000	-	-	808.371		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	89.529	-	-	-	89.529		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	89.529	-	-	-	89.529		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	89.529	-	-	-	89.529	33 . 00	
01	RM	-	89.529	-	-	-	89.529	065	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	708.842	10.000	-	-	718.842		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	708.842	10.000	-	-	718.842		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	79.529	10.000	-	-	89.529	33 . 00	
01	RM	-	79.529	10.000	-	-	89.529	065	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	99.090	-	-	-	99.090	33 . 00	
01	RM	-	99.090	-	-	-	99.090	065	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4574-1918-2898-8859

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	54.276	-	-	-	54.276	33 .00	
01	RM	-	54.276	-	-	-	54.276	065	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	62.597	-	-	-	62.597	33 .00	
01	RM	-	62.597	-	-	-	62.597	065	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	360.000	-	-	-	360.000	33 .00	
01	RM	-	360.000	-	-	-	360.000	065	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	53.350	-	-	-	53.350	33 .00	
01	RM	-	53.350	-	-	-	53.350	065	
JUMLAH		-	798.371	10.000	-	-	808.371		

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4574-1918-2898-8859

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

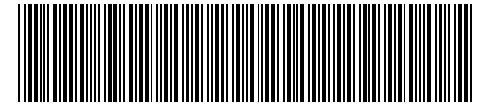
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667779	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	56.860	62.800	86.849	43.200	85.000	102.455	54.276	158.631	127.450	26.200	4.650	808.371
		BELANJA BARANG	0	56.860	62.800	86.849	43.200	85.000	92.455	54.276	158.631	127.450	26.200	4.650	798.371
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	28.500	12.800	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0	89.529
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	28.500	12.800	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0	89.529
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	28.360	50.000	38.620	43.200	85.000	102.455	54.276	158.631	127.450	26.200	4.650	718.842
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	28.360	50.000	38.620	43.200	85.000	92.455	54.276	158.631	127.450	26.200	4.650	708.842
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2021
IV A. B L O K I R**



DS:4574-1918-2898-8859

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667779] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

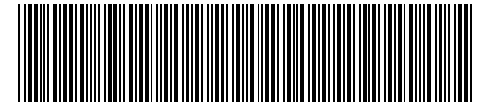
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:4574-1918-2898-8859

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667779] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003